



**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI II DPR RI  
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

---

Tahun Sidang	: 2018-2019
Masa Persidangan	: V
Rapat Ke-	: 4
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 17 Juni 2019
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK.III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Audinsi dengan Forum Wakil Kepala Daerah Indonesia
Ketua Rapat	: <b>Dr. Ir. E. Herman Khaeron, M.Si/ Wakil Ketua Komisi II DPR RI.</b>
Sekretaris Rapat	: Susi Daryati, SH, MH/ Plt. Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 17 dari 46 Anggota Komisi II DPR RI B. Direktur Fasilitas Kepala daerah dan DPRD Kementerian Dalam Negeri RI C. Staf Ahli Bidang Budaya Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB RI D. Forum Wakil Kepala Daerah Indonesia

## **I. PENDAHULUAN**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB RI, dan Forum Wakil Kepala Daerah Indonesia agenda audinsi dengan Forum Wakil Kepala Daerah Indonesia, pada hari Senin, 17 Juni 2019, dibuka pada pukul 10.30 WIB oleh Dr. Ir. E. Herman Khaeron, M.Si dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## **II. CATATAN**

1. Komisi II DPR RI memahami dan mendalami terhadap apa yang telah disampaikan di dalam rapat hari ini oleh Forum Wakil Kepala Daerah Seluruh Indonesia baik secara organisasi dan individu. Kami menyambut baik dan akan terus mengawal, memonitor serta mencarikan solusi yang tepat terhadap situasi terkait para wakil kepala daerah.
2. Komisi II DPR RI meminta dan mendelegasikan kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PANRB untuk segera merespon aspirasi dari Forum Wakil Kepala Daerah Seluruh Indonesia, kami akan terus memantau, memonitor dan akan menyampaikan secara khusus pada saat rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sehingga persoalan ini terus akan kita kawal, dan pada akhirnya kita bisa menempatkan tugas pokok, fungsi dan kewenangan tepat sesuai dengan jabatannya masing-masing. Ini semata mata untuk kita bisa meletakkan aturan ketatanegaraan dalam struktur birokrasi yang lebih efektif.

## **III. PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 13.50 WIB.

**Jakarta, 17 Juni 2019**  
**KETUA RAPAT**

**TTD**

**DR. IR. E. HERMAN KHAERON, M.SI**  
**A-419**